BAB III

OBJEK LAPORAN KKL

3.1 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

3.1.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

Arus globalisasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri pariwisata serta lain sebagainya. Fenomena ini sudah menjadi hal atau perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara. Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal mengenai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda namun secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950.

Momentum tersebut hingga saat itu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia. Organisasi Imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan sasanti Bhumi Pura Purna Wibawa yang berarti penjada pintu gerbang negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki 4 (empat) buah Direktorat yaitu Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal dan Status Kewarganegaraan Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian. Seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara maka saat ini serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian Untuk menunjang tugas-tugas keimigrasian dalam bekerjasama dengan negara lain. Sehingga saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing dan Status

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Kewarganegaraan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri.

Hal ini tidak berhenti sampai disitu saja bahkan dengan semakin meningkatnya kejahatan internasional atau yang dikenal dengan isitilah *transnational organization crime (TOC)* akhir-akhir ini seperti terorisme, penyelundupan manusia *(people smuggling)*, perdagangan manusia *(human trading)*, dan lain sebagainya, Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut. Sedianya telah direncanakan Direktorat baru tersebut dengan nama Direktorat Intelijen Keimigrasian, dimana Direktorat ini dirasakan cukup penting dalam menunjang tugas - tugas keimigrasian dan sekaligus mengantisipasi segala bentuk kejahatan internasional tersebut, akan tetapi hal ini masih dalam proses perencanaan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dengan pengembangan organisasi yang demikian itu, maka Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini secara jelas telah menentukan kerangka tugasnya yang tercermin dalam Tri Fungsi Imigrasi yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan negara dan penegakan hukum keimi-grasian, serta sebagai fasilitator ekonomi nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sangat membutuhkan dukungan dari setiap personil yang ada didalamnya, oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme,

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

kualitas dan kehandalan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Setiap personil Direktorat Jenderal Imigrasi harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang terdapat dalam Panca Bhakti Insan Imigrasi yakni: Taqwa, Menjunjung Tinggi Kehormatan, Cendekia, Integritas Pribadi dan Inovatif. Hal ini berarti setiap insan Imigrasi menyadari bahwa kualitas pribadi akan mendukung secara langsung kualitas kerjanya.

3.1.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas I Bandung telah menyusun rencana yang tertuang dalam Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Bandung. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut arah instansi pemerintah dalam melayani masyarakat agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, transparan serta produktif untuk mencapai tujuan.

Visi dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandung itu sendiri adalah ***Menjadikan Insan Imigrasi yang profesional, berwibawa dan berwawasan global, sehingga terwujud pelayanan prima dibidang keimigrasian bagi masyarakat di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung*** (Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Bandung Tahun 2010).

Sebagai upaya untuk mencapai Visi di atas, maka ditetapkan Misi Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung, yaitu :

1. Melaksanakan Pelayanan yang cepat
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Memberikan kemudahan yang berkualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat
4. Mengembangkan Sistem Informasi Keimigrasian

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

5. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dalam kerangka mengamankan serta menunjang pembangunan nasional

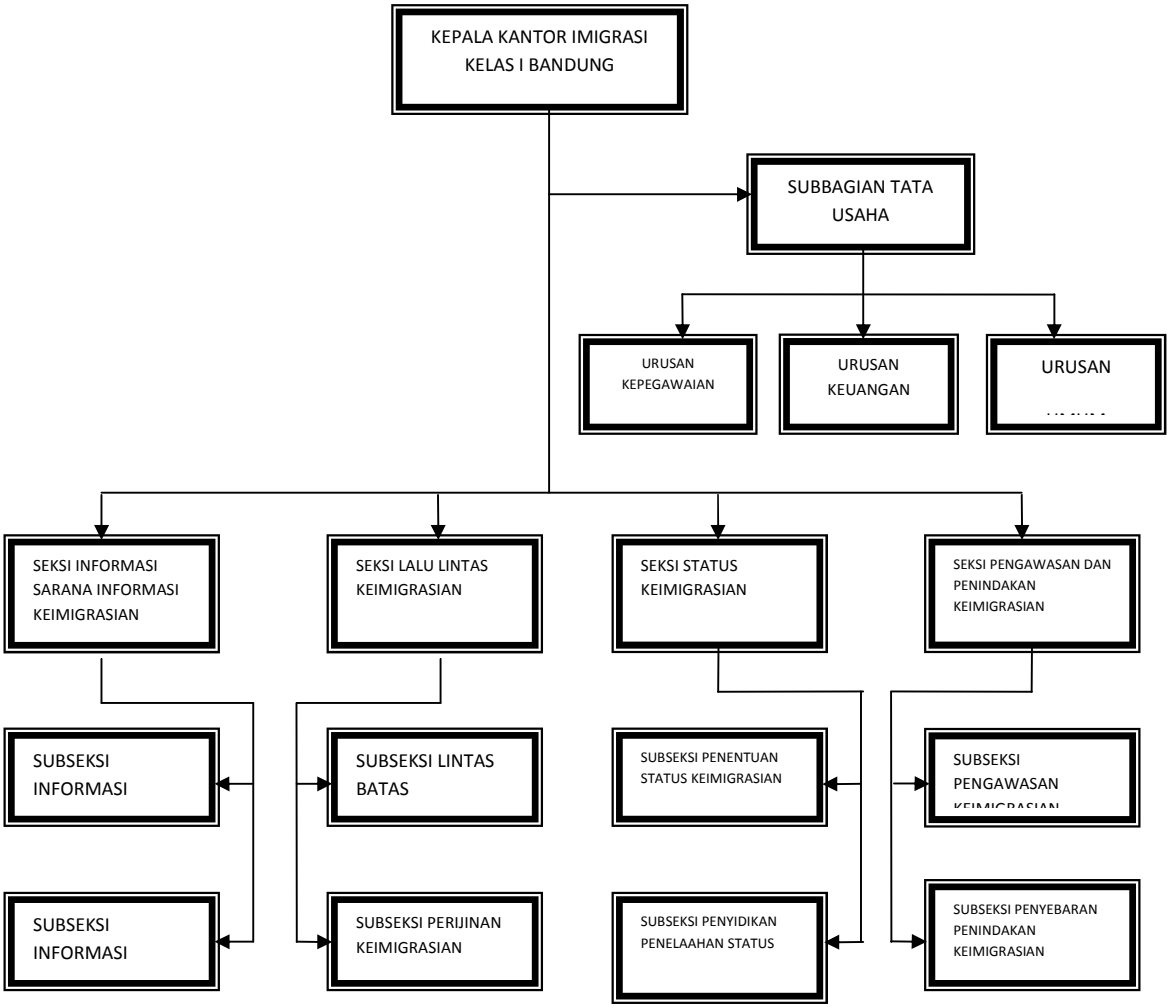
(Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Bandung Tahun 2010).

3.1.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

Struktur organisasi diperlukan dalam memberikan kemudahan dan memberikan kejelasan dalam bentuk kerangka mengenai gambaran berbagai hubungan kerja antara aparatur Kantor Imigrasi Kelas I Bandung serta menentukan tugas dan tanggungjawab berdasarkan jabatan masing-masing anggota dalam suatu wadah organisasi. Berikut struktur organisasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung :

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Bandung



Sumber : Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelasi I Bandung Tahun 2010.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Gambar di atas merupakan struktur organisasi dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, dan berikut uraian jabatan yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung :

1. Kepala Kantor

Memimpin dan mengawasi kinerja petugas dan berwewenang untuk memberi persetujuan penerbitan Paspor.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KASUBSI TU)

Membantu Kepala kantor dalam memimpin kantor untuk hal-hal yang bersifat Fungsional atau Intern kantor, dalam menjalankan tugas sehari-hari Kasuban Tata Usaha dibantu oleh tiga orang Kepala Urusan yang bertugas sesuai penunjukan dinasnya.

3. Kepala Seksi Informasi Sarana Keimigrasian (INFOKIM)

Memimpin seksi yang sesuai fungsinya adalah sebagai penyimpanan dan pengolahan arsip permohonan paspor dan ijin tinggal, dalam menjalankan tugas dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

4. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM)

Memimpin seksi yang berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas Warga Negara Indonesia yang akan keluar dan masuk dari wilayah Indonesia, dalam menjalankan tugas dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

5. Kepala Seksi Status Keimigrasian (STATUSKIM)

Mendata, mengawasi dan memberikan Ijin Tinggal bagi warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia dan memberikan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Status Kewarganegaraan bagi warga negara asing yang mengajukan untuk menjadi Warga Negara Indonesia, dalam menjalankan tugas dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

6. Kepala Seksi Pengawas Penindak Keimigrasian (WASDAKIM)

Melakukan pengawasan ketat bagi warga negara asing yang dinilai rawan pelanggaran undang-undang keimigrasian dan memegang daftar Cekal (cegah-tangkal), dalam menjalankan tugas dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

3.1.4 Pegawai Negeri Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan (Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999). Berdasarkan bunyi tersebut, bahwa sumber daya manusia Kantor Imigrasi Kelas I Bandung adalah pegawai negeri yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang pelayanan pembuatan paspor dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Bandung berjumlah 187 orang berdasarkan data yang diperoleh dari Subbagian Kepegawaian dan Umum pada tahun 2010. Perincian jumlah pegawai berdasarkan pangkat / golongan dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Tabel 3.1
Pangkat / Golongan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Bandung
Tahun 2010

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV/b	7
2.	Golongan IV/a	10
3.	Golongan III/d	14
4.	Golongan III/c	12
5.	Golongan III/b	21
6.	Golongan III/a	12
7.	Golongan II/d	8
8.	Golongan II/c	13
9.	Golongan II/b	4
10.	Golongan II/a	28
11.	Golongan I/c	6
12.	Golongan I/a	21
Jumlah		**156**

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Bandung Subbagian Kepegawaian dan Umum Tahun 2010.

3.2. Gambaran Umum Pelayanan Pembuatan Paspor RI di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

3.2.1 Aspek Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung bertugas dan berkewajiban untuk melayani masyarakat di lingkungan tugasnya dalam memberikan pelayanan dalam hal pembuatan paspor. Akan tetapi, semenjak pelayanan pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia memperbaharui sistem pelayanannya dan menggunakan sistem pelayanan *online* yang berbasis *internet*, maka seluruh warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan paspor di manapun dia berada walaupun tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh tempat dia berdomisili. Akan tetapi, yang bersangkutan tersebut tetap diwajibkan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

untuk memiliki dan melampirkan persyaratan wajib berupa KTP, KK (Kartu Keluarga), Akte Kelahiran.

Dengan mengajukan permohonan pada satu Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia maka data orang tersebut secara otomatis akan ada di setiap Kantor Imigrasi, Bandar Udara, Pelabuhan, dan tiap-tiap perbatasan negara yang terdapat Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pelayanan pemberian Dokumen pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandung terbagi dalam beberapa jenis, pemberian Dokumen Perjalanan bagi Warga Negara Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu

1. SPRI 48 (Surat Perjalanan Republik Indonesia 48 Halaman)

Dokumen ini diberikan dan diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dengan maksud dan tujuan untuk melakukan perjalanan wisata, ibadah seperti umroh atau menunaikan ibadah haji, belajar dan untuk menetap di negara lain.

2. SPRI 24 (Surat Perjalanan Republik Indonesia 24 Halaman)

Dokumen ini di berikan dan diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dengan maksud dan tujuan untuk bekerja dengan catatan si pemohon paspor telah terdaftar pada perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan telah mengatur penempatan Tenaga Kerja Indonesia tersebut di negara tujuannya.

3. SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor)

Dokumen ini diberikan dan diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dan tidak memiliki waktu

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

atau tidak memiliki cukup waktu untuk mengajukan permohonan pembuatan Paspor dikarenakan keadaan darurat, dan pada saat Warga Negara Indonesia ini telah sampai di negara tujuan baru kemudian di berikan Paspor yang diterbitkan oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) yang berada di negara yang dituju.

3.2.2 Prosedur Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.

Prosedur pembuatan paspor dimulai dari petugas loket, pemohon yang akan membuat paspor meminta formulir permohonan kepada petugas loket setelah formulir diterima oleh pemohon. Setelah itu pemohon mengisi nomer antrian sesuai tahapan mulai dari penyerahan formulir pembayaran, foto, sidik jari, dan wawancara hingga pengambilan paspor. Setelah nomor antrian dipanggil pemohon datang langsung kepetugas loket untuk :

1. Penerimaan dan pemeriksaan berkas.
2. Pemindaian dokumen
3. Pengecekan daftar cegah tangkal
4. Cetak tanda terima permohonan.

Ada pula data permohonan lewat *website* untuk penerimaan dan pemeriksaan berkas dengan cara :

1. Pengecekan daftar cegah tangkal
2. Cetak tanda terima permohonan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Setelah persyaratan dari petugas loket selesai maka pemohon diharapkan kebagian pembayaran, pembayaran disini pembayaran menyangkut pembayaran keimigrasian, mamasukan nomer perforasi SPRI (Surat Perjalanan RI) dan pencetakan tanda terima pembayaran dari petugas pembayaran, pemohon langsung ketempat data biometik untuk pengambilan foto wajah, pengambilan identitas, sidik jari, wawancara, dan tanda tangan paspor oleh pemohon.

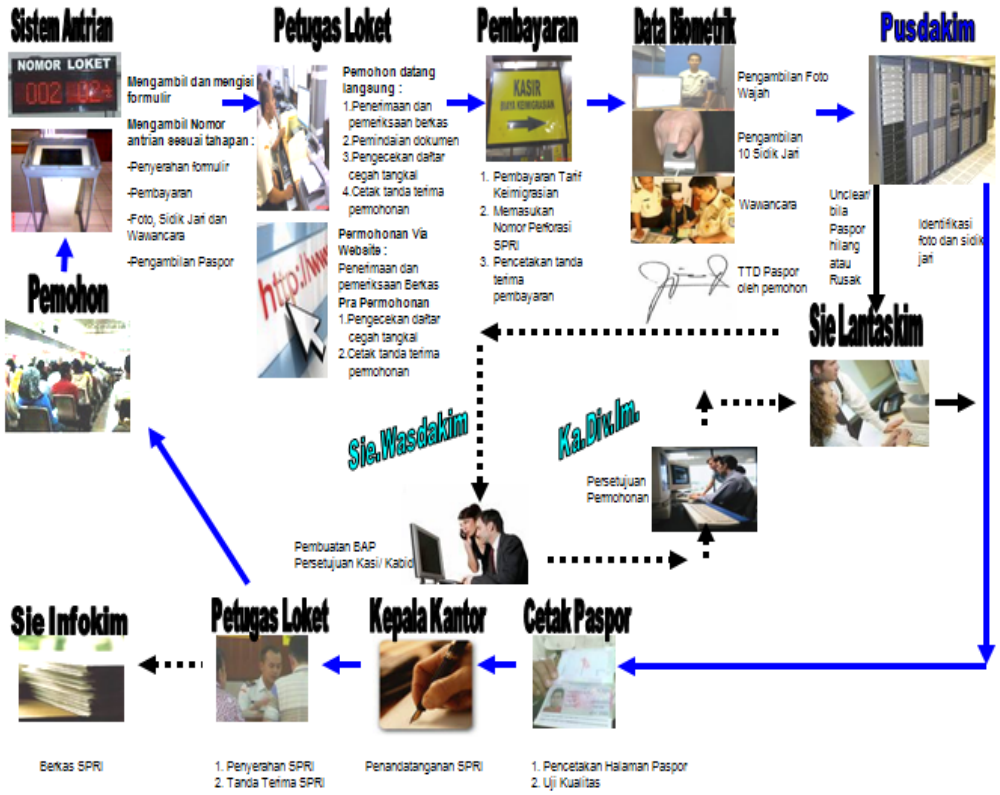
Semua data permohonan dan formulir permohonan selesai maka berkas disimpan di PUSDAKIM dan data yang telah disimpan akan dilanjutkan ke cetak paspor tapi apabila ada paspor rusak akan ditanda tangani oleh petugas Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM) dan dilanjutkan ke Seksi Pengawasan Penindak Keimigrasian (WASDAKIM) untuk pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan) oleh kepala seksi atau bidang, setelah pembuatan BAP dan disetujui oleh Kepala Seksi atau Kepala Bidang maka akan diserahkan kepada Kepala Divisi Keimigrasiaan untuk persetujuan permohonan. Setelah permohonan disetujui oleh Kepala Divisi Keimigrasian lalu diserahkan ke Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM) untuk diserahkan ke bagian catak paspor .

Bagian cetak paspor menyangkut cetakan halaman paspor dan uji kualitas paspor yang sudah jadi akan diserahkan kepada kepala kepala kantor untuk penandatangan SPRI. Setelah paspor ditanda tangani oleh kepala kantor maka pemohon kembali lagi kepetugas loket untuk penyerahan SPRI dan tanda terima SPRI setelah semua prosedur telah

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

dilaksanakan maka paspor akan diserahkan ke Seksi Informasi Sarana Keimigrasian (INFOKIM) untuk berkas SPRI. Prosedur pelayanan pembuatan paspor dapat digambarkan seperti berikut :

Gambar 3.2
Prosedur Pelayanan Pembuatan Paspor RI



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Bandung Tahun 2010.

Dalam hal ini permohonan pengajuan pembuatan paspor RI diajukan pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM), demi kelancaran pelayanan petugas menghimbau pada setiap masyarakat agar mengajukan permohonan tersebut langsung pada loket pelayanan yang telah tersedia dan tidak melalui calo yang banyak berkeliaran di kantor-kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. Cukup dengan melampirkan Kartu

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Nikah (bagi yang sudah menikah) dan Rekomendasi dari atasan (bagi pegawai swasta atau Pegawai Negeri Sipil) permohonan pengajuan paspor RI sudah dapat diproses.

Dalam hal pengajuan permohonan tersebut, dapat juga ditemukan beberapa kendala dan hambatan antara petugas dan masyarakat yang cukup menggangu kelancaran pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, yaitu dengan begitu banyaknya permohonan yang masuk setiap harinya maka petugas loket tersebut terpaksa membatasi waktu penerimaan permohonan sampai dengan pukul 2 siang.

Hal tersebut cukup menyebabkan masyarakat yang telah datang dari lokasi yang cukup jauh menjadi kecewa dan marah, karena pada saat dia datang diatas pukul 2 siang, petugas loket tidak dapat menerima berkas permohonan yang telah dia persiapkan.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com